

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

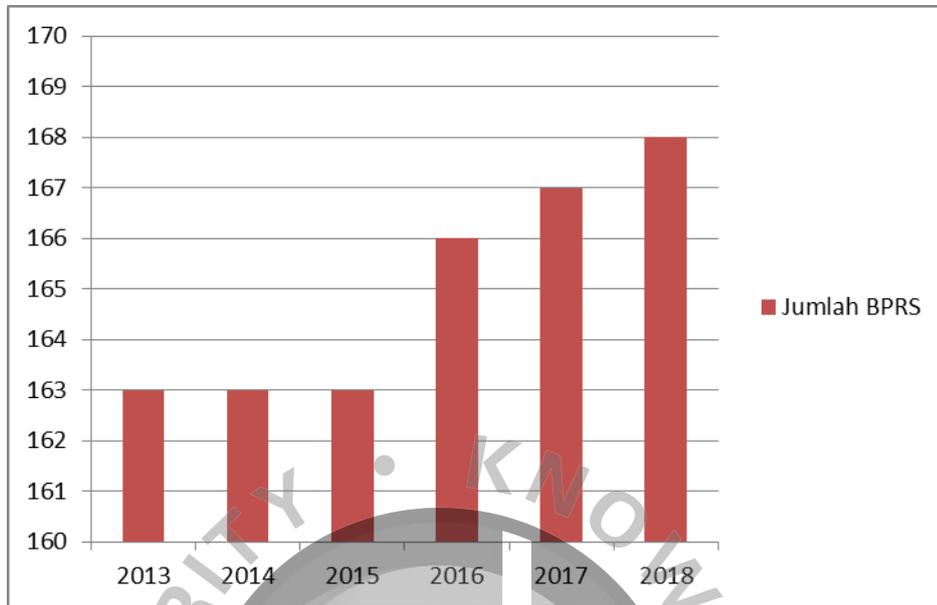
### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari sistem perbankan yang diyakini dapat memiliki peranan yang penting dalam Perekonomian Nasional. Sistem Perbankan Syariah menawarkan pola kerjasama kemitraaan dengan sistem bagi hasil, keuntungan, dan risiko usaha. Perkembangan perbankan syariah dalam dekade terakhir terus menunjukkan derap langkah yang positif dan cukup menggembirakan, hal ini tercermin dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi, dan dana masyarakat serta penyaluran pembiayaan yang terus meningkat (Karim, 2017:25 ).

Keberhasilan perbankan syariah di Tanah Air tidak bisa dilepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Koperasi Syariah, BMT, LKS sejenis). Kedudukan LKMS yang antara lain direpresentasikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga non bank lainnya seperti BMT dan Koperasi Pesantren sangat vital dalam menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit usaha syariah.

Berdasarkan undang-undang No 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran BPRS hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lain dalam

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip syariah.



Grafik 1.1  
Perkembangan Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah September 2018

Dari Grafik 1.1 diatas terlihat perkembangan BPRS selama 6 (enam) tahun terakhir ini terhitung dari tahun 2013-2018 mengalami peningkatan yang cukup baik, dari 163 BPRS di tahun 2013 meningkat menjadi 168 BPRS di tahun 2018. Tentunya hal ini sangat menggembirakan, karena semakin banyaknya wilayah atau daerah yang sudah bisa dilayani oleh perbankan syariah khususnya BPRS (OJK, Statistik Perbankan Syariah , September 2018).

Perkembangan jumlah BPRS tidak lepas peran serta OJK, BI , MUI dan masyarakat Ekonomi Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya Pemerintah Daerah yang mendirikan BPRS di daerahnya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD). Selain itu ada juga beberapa BPR konvensional yang di konversi menjadi BPRS.

Tabel 1.1 .

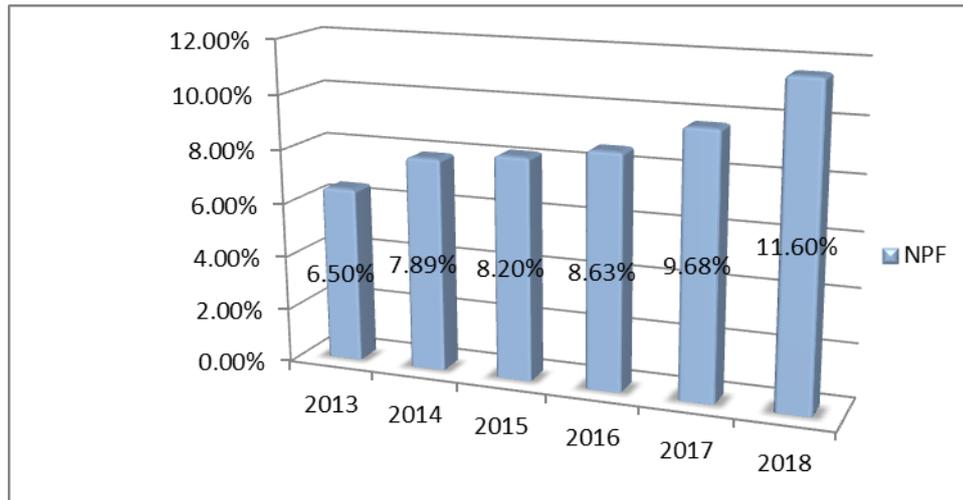
Indikator Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Juta Rupiah

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	AAGR
<b>Pembiayaan</b>	4,433,492	5,004,909	5,765,171	6,662,556	7,763,951	8,679,643	14.4%
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	3,666,174	4,028,415	4,801,888	5,823,964	6,987,280	7,739,373	16.2%
<b>L / R Tahun berjalan</b>	129,280	121,945	137,719	159,003	213,179	154,135	5.8%
<b>Asset</b>	5,833,488	6,573,331	7,739,270	9,157,801	10,840,375	11,894,953	15.4%

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah September 2018

Pada Tabel 1.1 Kinerja BPRS dalam hal keuangan menunjukkan pertumbuhan indikator keuangan yang baik. Pertumbuhan BPRS cukup pesat, terlihat dari tumbuhnya Pembiayaan dari Rp. 4,4 triliun di tahun 2013 menjadi Rp. 8,7 triliun di tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 14,4% setiap tahunnya. Dana Pihak Ketiga tumbuh dari Rp. 3,6 triliun di tahun 2013 menjadi Rp. 7,7 triliun di tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 16,2% setiap tahunnya, Laba BPRS tumbuh dari Rp. 129 miliar di tahun 2013 menjadi Rp. 154 miliar di tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan 5,8 % setiap tahunnya dan Asset BPRS berkembang dari Rp. 5,8 triliun di tahun 2013 menjadi Rp. 11,9 triliun di tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 23,6% setiap tahunnya (OJK, Statistik Perbankan Syariah , September 2018).



Grafik 1.2  
Perkembangan NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah September 2018

Grafik 1.2 *Non Performing Financing* (NPF) BPRS yang terus meningkat dari angka 6,50% di tahun 2013 menjadi 9,68% di tahun 2017 dan ini sudah melebihi batas maksimal kesehatan BPRS yaitu 7% (Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007). Dengan kondisi NPF BPRS yang terus meningkat tersebut, perlu penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF BPRS di Indonesia.

NPF BPRS dalam 6 (enam) tahun terakhir terlihat semakin besar, hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat kesehatan BPRS. Semakin besar NPF, maka keuntungan yang seharusnya di terima oleh BPRS akan berkurang, bahkan modal pun akan tergerus oleh biaya pencadangan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut akan mempengaruhi laba yang diperoleh oleh BPRS. Melihat begitu pentingnya pengaruh NPF terhadap tingkat kesehatan BPRS, maka perlu penelitian yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF BPRS di Indonesia.

Faktor-faktor yang diyakini mempengaruhi NPF di BPRS yang telah diteliti terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti, tingkat inflasi, suku bunga BI (*BI-rate*), nilai tukar rupiah, *Gross Domestic Product* (GDP) dan indikator makro lainnya. Kondisi makro ekonomi Indonesia diyakini mempengaruhi kondisi usaha para nasabah pembiayaan BPRS. Jika kondisi makro ekonomi baik dan stabil diharapkan kondisi usaha membaik dan para nasabah bisa membayar kewajibannya dengan lancar. Berikut tabel yang menunjukkan kondisi Makro Ekonomi Indonesia yang diwakilkan oleh 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Kondisi Makro Ekonomi di Indonesia

Makro Ekonomi	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi	%	8.38%	8.36%	3.35%	3.02%	3.61%	2.88%
Bi Rate	%	7.50%	7.75%	7.50%	4.75%	4.25%	5.75%
Kurs (nilai tukar)	USD terhadap Rp	12,189	12,440	13,795	13,436	13,548	14,929

Sumber : Link dari [www.BI.go.id](http://www.BI.go.id), data diolah

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa kondisi makro ekonomi selama 5 tahun di perlihatkan dengan kondisi inflasi yg terjaga di rata-rata 3% , BI Rate terjaga di kisaran 5%. Hal yang perlu diwaspadai adalah menguatnya nilai tukar (kurs) Dollar Amerika Serikat (USD) terhadap rupiah. Penguatan USD dikhawatirkan akan meningkatkan beberapa komoditas yang di impor terutama komoditas bahan bakar minyak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Perekonomian yang kurang baik akan berakibat terhadap iklim usaha yang memburuk dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan perbankan khususnya BPRS di Indonesia.

Faktor-faktor internal yang diyakini mempengaruhi NPF antara lain adalah *Return On Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, rasio efisiensi (BOPO), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, kebijakan penyaluran pembiayaan, dan faktor internal lainnya.

Dari penelitian sebelumnya, hasil penelitian Ginting (2016) menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti *Gross Domestic Product (GDP)*, memiliki pengaruh yang negatif terhadap *Non Performing Loan (NPL)* Bank Umum di Indonesia. Artinya jika semakin membaiknya perekonomian yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin mengurangi NPL. Tingkat suku bunga dan inflasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPL. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat suku bunga maka dapat meningkatkan tingginya rasio NPL dari berbagai sektor perekonomian. Tingginya tingkat suku bunga perbankan dapat mengurangi kemampuan debitur dari sektor-sektor perekonomian dalam membayar.

Selanjutnya, hasil penelitian Barus dan Erick (2016) menunjukkan bahwa secara simultan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Nett Interest Margin (NIM)*, Rasio Efisiensi (BOPO), Suku Bunga SBI, dan Inflasi berpengaruh terhadap NPL, sedangkan secara parsial LDR, NIM, BOPO, Suku Bunga SBI dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif sedangkan Inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL, sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL.

Hasil penelitian Akbar (2016) menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Financing (NPF)*. *Gross Domestic Product*

(GDP) berpengaruh negatif terhadap NPF. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap NPF. *Finance to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap NPF.

Secara parsial variabel BOPO dan SBIS berpengaruh positif signifikan, sedangkan CAR dan Inflasi berpengaruh secara signifikan negatif terhadap NPF bank syariah. Untuk variabel FDR, inflasi dan kurs secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF. Secara bersama-sama, variabel BOPO, CAR, FDR, SBIS, inflasi dan kurs (Aulani, 2016).

Hasil penelitian Effendi, Thyarany, Nursyamsiah (2015) menunjukkan bahwa: Pertama, Variabel Internal Bank yang mempengaruhi NPF adalah *Ratio of Revenue Sharing Financing* (RR), ROA, CAR, BOPO, and Bank size. *Ratio of Revenue Sharing Financing* (RR), Bank size, CAR and ROA variables berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Kedua variabel makroekonomi yang mempengaruhi NPF adalah inflasi dan GDP. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.

Hasil Penelitian Firmansari (2015) mengatakan bahwa GDP berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap NPF. Inflasi berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap NPF. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh tidak signifikan dan bernilai Positif terhadap NPF. Secara simultan GDP, Inflasi dan FDR Berpengaruh terhadap NPF.

Hasil penelitian Maidalena (2014) menyatakan bahwa *Capital Adequacy*

*Ratio* (CAR) memiliki pengaruh terhadap NPF. Bank dapat menjadi salah satu faktor penyebab baik atau buruknya kualitas kredit yang diberikan. Apabila dalam suatu pemberian kredit dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dan terhadap kredit yang telah diberikan tersebut dilakukan pengawasan dengan baik, maka kualitas kredit suatu Bank akan tetap terjaga dengan baik. Sebaliknya apabila pemberian kredit tidak dilakukan dengan baik, maka kualitas kredit suatu Bank akan dengan mudah menjadi buruk.

Firmansyah (2014) melakukan penelitian dengan hasil dengan menganalisis pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Hasil estimasi dan analisis memberikan beberapa temuan empiris; pertama, GDP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Artinya jika perekonomian sedang naik maka pembiayaan bermasalah pada BPRS akan berkurang sehingga GDP menjadi sinyal positif bagi BPRS. Kedua, inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Artinya inflasi yang merupakan indikator lemahnya ekonomi/daya beli masyarakat tidak lantas membuat BPRS menjadi panik karena masyarakat terbukti akan mengutamakan kepentingan kewajibannya dalam membayar/melunasi hutang pembiayaannya. Ketiga, likuiditas berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Artinya likuiditas yang merupakan indikator mikroekonomi/ internal pengelolaan keuangan BPRS berdampak pada tingginya pembiayaan bermasalah. Semakin likuid maka semakin luwes dalam menyalurkan pembiayaan tetapi mempunyai resiko yang tinggi pula sehingga harus ada perhatian khusus dari manajemen.

Firmansyah (2014) juga menemukan bahwa ukuran bank dan rasio biaya

operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS. Hal ini memberikan bukti statistik bahwa besar kecilnya total aset serta efisiensi BPRS tidak berpengaruh terhadap non-performing loan mereka. Selain itu, berdasarkan hasil analisis sobel test dengan bootstrapping data membuktikan bahwa likuiditas BPRS yang diukur dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR), tidak memediasi pengaruh ukuran bank, BOPO, GDP dan inflasi terhadap pembiayaan bermasalah.

Hasil Penelitian Asnaini (2014) menyatakan sebagai berikut : Pertama, *Gross Domestic Product* (GDP) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Kedua, Inflasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Keempat, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kelima, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memberikan pengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil penelitian Haifa (2015) menyatakan hasil analisis data dengan menggunakan metode ECM (*Error Correction Model*) menyebutkan bahwa dalam jangka panjang *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing*, Rasio Alokasi

Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*, Inflasi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* dan Kurs Rupiah Terhadap Dolar berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia. Dalam jangka pendek *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* dan Rasio Alokasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan *Profit Loss Sharing* berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia.

Rika Lidyah (2016) menyatakan hasil penelitian menunjukkan Variabel Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF; Variabel *BI Rate* secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan terhadap NPF; Variabel CAR secara parsial berpengaruh negatif terhadap NPF; Variabel BOPO secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan terhadap NPF; Berdasarkan hasil uji statistik F dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat dipergunakan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, *BI Rate*, CAR, BOPO terhadap NPF secara bersama-sama, yang berarti ada pengaruh secara simultan Inflasi, *BI Rate*, CAR, BOPO terhadap NPF.

Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang telah dipaparkan di atas, masih memperlihatkan perbedaan pengaruh variabel Inflasi, nilai tukar, suku bunga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) sehingga perlu dilakukan kembali penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF BPRS di Indonesia. Karena itu, Penulis meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain

variabel Inflasi, tingkat suku bunga (*BI-rate*), Nilai Tukar, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan kebijakan pembiayaan di BPRS. Kebijakan pembiayaan yang diukur adalah Rasio alokasi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibanding total pembiayaan yg disalurkan (RUMKM). Berdasarkan latar belakang dan kajian literatur di atas, maka judul penelitian ini adalah :

**“Analisis pengaruh Inflasi, BI-Rate, Nilai Tukar, CAR, FDR dan Kebijakan Pembiayaan Terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018?
2. Apakah *BI-rate* (tingkat suku bunga) berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018?
3. Apakah nilai tukar mata uang asing berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018?
5. Apakah *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018?

6. Apakah kebijakan penyaluran dana (pembiayaan) berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap *Non-Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar mata uang asing terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Non Performing-Financing* pada BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018.
6. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan penyaluran dana (pembiayaan) terhadap *Non-Performing Financing* pada BPRS BPRS di Indonesia periode tahun 2013 s.d 2018.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Regulator akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan kebijakan pembiayaan di sektor perbankan syariah khususnya BPRS, sehingga pertumbuhan perbankan syariah tetap terjaga dan dengan kompetisi yang sehat.

2. Bagi praktisi perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah akan bermanfaat untuk melihat hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap kesehatan bank dan kebijakan pembiayaan yang akan dijalankan supaya pembiayaan bisa berjalan lancar.
3. Bagi akademisi menambah wawasan intelektual akademis, mulai dari dasar teori hingga penerapan pembiayaan di BPRS. Bagi Peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan masukan, sebagai studi komparatif batasan penelitian bagi peneliti yang mendalami masalah ini di masa yang akan datang.

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Batasan penelitian yang terkait untuk pengujian adalah:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh faktor internal yang terdiri dari CAR, FDR dan Rasio Pembiayaan UMKM dan faktor eksternal yang terdiri dari inflasi, nilai tukar dan suku bunga.
2. Batasan objek penelitian hanya pada BPRS di Indonesia.
3. Periode penelitian hanya pada periode tahun 2013 s.d 2018.